

TESIS

**KONSEKUENSI YURIDIS PENAMBAHAN
KETENTUAN TENTANG BATAS MINIMUM
UTANG PADA SYARAT KEPAILITAN
TERHADAP KREDITOR**



TIRA SAFIRA FREDERICA

NPM: 205203214

PROGRAM STUDI S2

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

TESIS

**KONSEKUENSI YURIDIS PENAMBAHAN
KETENTUAN TENTANG BATAS MINIMUM
UTANG PADA SYARAT KEPAILITAN
TERHADAP KREDITOR**



TIRA SAFIRA FREDERICA

NPM: 205203214

PROGRAM STUDI S2

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S2

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Tira Safira Frederica
Nomor Mahasiswa : 205203214
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Konsekuensi Yuridis Penambahan Ketentuan
tentang Batas Minimum Utang pada Syarat
Kepailitan terhadap Kreditor

Nama Pembimbing

Tanggal

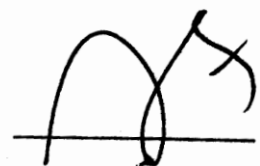
Tanda tangan

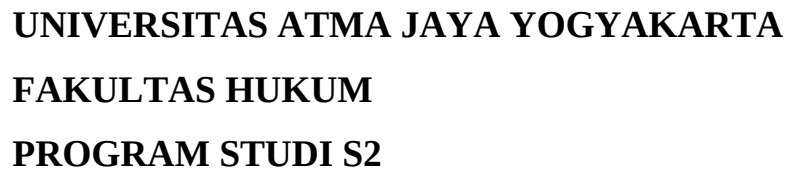
1. Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

 29/6/2022

2. Prof. Dr. Th. Anita Ch. S.H., M.Hum.

29/6/2022





Nama : Tira Safira Frederica
 Nomor Mahasiswa : 205203214
 Konsentrasi : Hukum Bisnis
 Judul Tesis : Konsekuensi Yuridis Penambahan Ketentuan tentang Batas Minimum Utang pada Syarat Kepailitan terhadap Kreditor

Dewan Penguji Nama Pembimbing Tanda tangan

- 

LB

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tira Safira Frederica

NPM : 205203214

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tesis berjudul: **“KONSEKUENSI YURIDIS PENAMBAHAN KETENTUAN TENTANG BATAS MINIMUM UTANG PADA SYARAT KEPAILITAN TERHADAP KREDITOR”** ini merupakan hasil karya asli, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan tesis ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juli 2022

Yang menyatakan,



Tira Safira Frederica

ABSTRAK

Undang-Undang Kepailitan memberikan persyaratan yang sederhana untuk mengajukan permohonan kepailitan. Keadaan ini memunculkan banyak kehendak pengajuan permohonan kepailitan dari kreditor yang disebabkan karena debitor tidak mampu atau bahkan tidak mau membayar utang yang menyebabkan penumpukan perkara kepailitan di pengadilan, sehingga mendorong adanya penambahan persyaratan batas minimum utang pada syarat kepailitan. Persoalan yang penting dan menarik untuk diteliti adalah soal “Konsekuensi Yuridis Penambahan Ketentuan tentang Batas Minimum Utang pada Syarat Kepailitan terhadap Kreditor”. Jenis penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan menggunakan data sekunder. Penelitian ini berupa konsekuensi yuridis penambahan ketentuan tentang batas minimum utang pada syarat kepailitan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, penelitian akan berfokus pada konsep-konsep hukum yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimanakah justifikasi konsep tentang batas minimum utang dan bagaimanakah konsekuensi yuridis penambahan ketentuan batas minimum utang pada syarat kepailitan. Dari pembahasan yang akan dilakukan maka terdapat kesimpulan bahwa secara konseptual atau teoritis tidak ada justifikasi yang membenarkan adanya perbedaan kreditor berdasarkan jumlah utang dan hal tersebut menimbulkan konsekuensi yaitu disimpanginya kedudukan kreditor atas hak tagih.

Kata Kunci: kedudukan kreditor, konseptual, jumlah utang, syarat kepailitan

ABSTRACT

The bankruptcy act provides simple requirements petition. This situation gives rise to many requests for bankruptcy applications from creditors because the debtor is unable or even unwilling to pay the debt which causes a buildup of bankruptcy cases in court, encouraging the addition of the minimum debt requirement on the bankruptcy requirements. An important and interesting issue to be investigated is the “Juridical Consequences of Adding Provisions concerning the Minimum Debt Limit in Bankruptcy Conditions for Creditors”. This type of legal research is normative legal research, that focuses on positive legal norms in the form of laws and regulations and uses secondary data. This research is a consequence of the addition of provisions regarding the minimum debt limit on the terms of bankruptcy. The approach used in this research is a conceptual approach, the research will focus on legal concepts that depart from the views and doctrines that develop in the science of law. In this study, it will be discussed whether there is a justification for the concept of a minimum debt limit and what are the juridical consequences for creditors if the minimum debt limit is included in the bankruptcy conditions. From the discussion that will be carried out, there is a conclusion that conceptually or theoretically there is no justifications that justifies the difference between creditors based on the amount of debt and this has the consequence of creditors on claim rights.

Key Words: position of creditor, conceptual, debt amount, bankruptcy terms

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya tesis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi S2, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul **“KONSEKUENSI YURIDIS PENAMBAHAN KETENTUAN TENTANG BATAS MINIMUM UTANG PADA SYARAT KEPAILITAN TERHADAP KREDITOR”**.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari kendala dan hambatan, karena dengan adanya keterlibatan beberapa pihak yang sudah menyumbangkan pemikiran-pemikirannya maka penulisan ini dapat terselesaikan. Semoga penulisan tesis ini bisa memberikan pengaruh kepada pemerintah dan masyarakat. Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Suwarjito dan Ibu Hartitik selaku orang tua, serta Salsa Mayrenda Riza selaku adik penulis, yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan dalam penulisan hukum ini;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi S2;
4. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing tesis I yang telah meluangkan waktu, membimbing, membantu dan mendampingi penulisan hukum ini;

5. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Ch. S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing tesis II yang telah meluangkan waktu, membimbing, membantu dan mendampingi penulisan hukum ini;
6. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji tesis yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan dalam penulisan hukum ini;
7. Bapak Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang tersertifikasi sebagai Hakim Niaga; Bapak Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. dan Ibu Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn selaku Ahli Hukum Kepailitan; serta Bapak Ariyo Priyambodo, S.H., CMB., CRA dan Bapak Fajar Thariq Rahartarto, S.H selaku Advokat yang tersertifikasi sebagai Kurator, yang kesemuanya telah menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini;
8. Seluruh dosen dan staff/karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan tesis ini jauh dari sempurna, banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran dari seluruh pihak yang bisa membangun dan dapat berguna bagi kita semua. Akhir kata diucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 13 Juli 2022

Yang menulis,



Tira Safira Frederica

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	13
G. Sistematika Penulisan Hukum	14
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kepailitan	15
B. Sejarah Kepailitan	18
1. Masa sebelum berlakunya <i>Faillissement Verordening</i>	19
2. Masa berlakunya <i>Faillissement Verordening</i>	20

3. Masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Nasional	21
4. Masa berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998	22
5. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998	23
6. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004	23
C. Kualifikasi Kreditor	27
D. Prinsip-Prinsip Kepailitan	32
E. Syarat Kepailitan	37

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan	40
C. Sumber Data	41
D. Pengumpulan Data	42
E. Metode Analisis Data	44
F. Proses Berpikir/Prosedur Bernalar	46

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Justifikasi Konsep tentang Batas Minimum Utang	47
1. Perkembangan Aturan	47
2. Aturan yang saat ini	50
3. Aspek Teori	52
4. Aspek Praktis	55
B. Konsekuensi Yuridis terhadap Kreditor bila Batas Minimum Utang ditambahkan dalam Syarat Kepailitan	59
1. Dasar Hubungan antara Kreditor dan Debitor dalam Kepailitan	59

2. Kualifikasi Kreditor	62
3. Perbedaan Kedudukan atas Hak Tagih	66
4. Konsekuensi yang timbul	67

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	----

